



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 14 Januari 2021

Halaman: 5

Masifkan Sosialisasi agar PTKM Benar-Benar Mengerem Kasus Covid-19

TAJUK

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengerem angka kasus Covid-19, Pemda DIY turut melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau dalam pelaksanaannya mengambil nama Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di sejumlah sektor.

PTKM menjadi strategi dari pemerintah untuk menghadapi situasi pandemi saat ini, antara lain perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran Covid-19, pembangunan pusat karantina dan isolasi serta manajemen rumah sakit tempat tidur. Pelaksananya dari 11 Januari sampai 25 Januari mendatang.

Namun, ketika sudah diterapkan, dalam pelaksanaannya sejumlah warga dan pelaku usaha mengaku tidak mengetahui adanya PTKM. Berdasarkan hasil pengawasan PTKM hari pertama, masih banyak perkantoran dan tempat usaha yang belum mengetahui adanya PTKM pada 11-25 Januari. Didapati enam perusahaan tidak menerapkan WFH sama sekali dan enam tempat makan yang tidak menerapkan kapasitas maksimal 25%.

Untuk pembatasan jam perekonomian. Kenapa? Karena PTKM mendapat protes keras dari kalangan pedagang di Kota Jogja. Ini menunjukkan lemahnya sosialisasi sehingga PTKM murni dipahami sebagai pembatasan kegiatan ekonomi. Padahal, PTKM adalah upaya menekan persebaran Covid-19.

Simpang siurnya pemahaman warga dan para pelaku usaha di berbagai wilayah DIY adalah wujud imbas ketidaktegasan pemerintah sejak awal pandemi. Sejak sekarang pemerintah harus mengubah cara pandang itu. Tegas dan konsisten. Bukan mengendurkan, mengingatkan, mengetatkan yang ujung-ujungnya membuat warga malah bingung.

Dalam penerapan PTKM, pemerintah harus memasifkan upaya sosialisasi dan lebih tegas dalam menindak pelanggaran. Jika pemerintah lembek, upaya pembatasan untuk menurunkan laju persebaran Covid-19 hanya sia-sia. Selain itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan instansi pemerintah dan instansi turunannya mesti konsisten karena banyak instansi justru sudah kendor dalam menerapkan prokes, seperti tidak ada lagi kebiasaan cek suhu.

tim gabungan telah mengeluarkan teguran untuk 14 tempat usaha. Mereka ditegur karena belum menerapkan protokol kesehatan dan melanggar jam operasional. Belasan usaha yang ditegur tersebut berasal dari Kapanewon Bantul dan Kapanewon Imogiri.

Berkaca dari pelaksanaan hari pertama PTKM sampai Kamis (13/1), PTKM masih butuh sosialisasi yang tepat ke seluruh lapisan warga maupun pelaku usaha, terutama skala kecil.

PTKM dalam dua pekan ke depan tak akan bisa maksimal tanpa sosialisasi yang baik kepada warga terutama pelaku usaha

Instansi

1.

Tindak Lanjut

☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005